JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN DAN EKONOMI
(JAMANE)
Vol. 3, No. 2, November (2024), Page 11-19
P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462)

Keseimbangan Ekonomi Dan Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Konservasi Keanekaragaman Hayati Sebagai Aset Ekonomi

Deby Nurmaya Sari[1], Mei Linda[2], Mia Damayanti[3], Raizky Rienaldy Pramasha[4]

[1234] Islamic Managemen and Economi Faculty, UIN Raden Intan, Lampung, Indonesia
* Corresponding Author. E-mail: ebyztk@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati ini berperan penting sebagai sumber daya ekonomi, seperti pangan, kesehatan, dan energi, namun terancam oleh deforestasi dan degradasi hutan akibat konversi lahan dan pembalakan liar. Pengelolaan hutan yang baik dapat meningkatkan stok karbon, melestarikan ekosistem, dan mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Praktik-praktik seperti agroforestri dan penghijauan, serta partisipasi aktif masyarakat, penting untuk keberhasilan pelestarian hutan. Kebijakan pemerintah dan inisiatif global, termasuk REDD+ dan FOLU Net Sink 2030, mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti konflik antara kebutuhan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia memiliki potensi untuk memimpin dalam konservasi hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

Kata kunci: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Deforestasi, Agroforestri, Redd+, Folu Net Sink 2030, Mitigasi Perubahan Iklim.

Abstract

Sustainable forest management is key to maintaining the balance between economic, social, and environmental interests in Indonesia, one of the countries with the richest biodiversity in the world. This biodiversity plays a crucial role as an economic resource, such as for food, health, and energy, but is threatened by deforestation and forest degradation due to land conversion and illegal logging. Proper forest management can increase carbon stocks, conserve ecosystems, and support long-term economic sustainability. Practices such as agroforestry and reforestation, along with active community participation, are vital for successful forest conservation. Government policies and global initiatives, including REDD+ and FOLU Net Sink 2030, support sustainable forest management. However, challenges remain in implementation, such as conflicts between local economic needs and environmental conservation. With stronger collaboration between the government, communities, and the private sector, Indonesia has the potential to lead in tropical forest conservation and climate change mitigation.

Keywords: *Sustainable forest Management, Deforestation, Agroforestry, Redd+, Folu Net Sink 2030, Climate Change Mitigation.*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati Indonesia beserta komponen-komponennya memiliki peran penting sebagai penopang kemajuan umat manusia di masa depan, terutama sebagai sumber untuk kesehatan, ketahanan pangan, serta energi, baik yang memiliki manfaat aktual maupun potensial bagi umat

Submitted	Accepted	Published
26-11-2024	12-12-2024	17-12-2024

: https://doi.org/10.56248/jamane.v3i2.99

manusia. Manfaat-manfaat tersebut harus selalu dijaga keberlanjutannya, sehingga berguna untuk generasi masa kini ataupun yang akan datang. Keberlanjutan adalah faktor penting agar umat manusia bisa terus melangsungkan hidup dalam jangka waktu yang panjang dengan mengelola sumber daya alam (SDA) yang terbatas. Di sinilah pentingnya konservasi, karena melalui konservasi, manusia didorong untuk bijaksana dalam memanfaatkan SDA yang jumlahnya terbatas. Pelaksanaan konservasi yang efektif hanya dapat tercapai jika didukung oleh perangkat hukum yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi suatu keharusan untuk memastikan SDA hayati beserta keanekaragamannya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara dengan kekayaan SDA hayati terbesar di dunia, selain Brasil dan Zaire atau Republik Demokratik Kongo.

Namun, keanekaragaman hayati pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem merupakan sumber daya alam (SDA) yang sangat kompleks, karena meskipun keanekaragamannya tinggi, jumlahnya tetap terbatas. Selain itu, meskipun memiliki kemampuan untuk memperbarui diri (renewable), sumber daya alam hayati memiliki sifat yang tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula (irreversible) jika dieksploitasi secara berlebihan melebihi batas kemampuannya. Permasalahan ini tercermin dari meningkatnya ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: (a) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berlebihan, termasuk secara ilegal; dan (b) kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi lahan dan penggunaan bahan berbahaya dalam pemanfaatan SDA. Kompleksitas sumber daya alam hayati ini semakin diperparah oleh tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi di sebagian besar masyarakat Indonesia, yang menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap keanekaragaman hayati.

Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan isu penting dari perspektif perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati. Hutan berkontribusi terhadap perlindungan iklim, tidak hanya sebagai pemasok kayu dan sumber daya lainnya, namun juga sebagai penyimpan karbon yang penting. Menurut Sulistiana (2017), hutan menyerap sekitar 2,6 miliar ton karbon dioksida setiap tahunnya, sehingga pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hutan tropis Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, dengan lebih. dari 17.000 spesies tumbuhan dan 1.500 spesies hewan. Namun, deforestasi dan degradasi hutan yang cepat akibat konversi lahan untuk pertanian dan pembalakan liar mengancam keanekaragaman hayati ini. Sebuah studi oleh Margono dkk. (2014) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 6,02 juta hektar hutan antara tahun 2000 dan 2012, yang berdampak langsung pada habitat berbagai spesies.

Pengelolaan hutan lestari yang berfokus pada keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan seharusnya dapat mengatasi masalah ini. Konsep ini mencakup praktik-praktik seperti penghijauan, wanatani, dan pemantauan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Menurut Purnomo dkk. (2017), penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan dapat meningkatkan stok karbon dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati.

Dampak positif pengelolaan hutan lestari juga terlihat pada peningkatan kualitas ekosistem. Hutan yang dikelola dengan baik dapat memberikan jasa ekosistem yang penting seperti pengelolaan air, konservasi tanah, dan habitat bagi spesies endemik. Sebuah studi oleh Supriyadi dkk. (2019) menunjukkan bahwa

Copyright © 2024 Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)
P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462)

hutan yang dikelola secara lestari memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik dibandingkan hutan yang ditebang secara ilegal.

Namun, dalam penerapan pengelolaan hutan lestari masih ada tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masalah antara kepentingan ekonomi lokal dan konservasi. Masyarakat sering bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, sehingga jika pengelolaan hutan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketegangan. Menurut Suyanto dan Kurniawan (2018), partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan.

Dalam pelestarian dan pengelolaan hutan sangat penting kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sehingga hal tersebutb tidak boleh diabaikan. Kebijakan yang mendukung keterlibatan antara semua pemegang kepentingan akan menciptakan rancangan kerja yang lebih efektifn dan efisien. Penelitian oleh Hadi dan Nasution (2020) menunjukkan bahwa kerjasama yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan hutan. Keanekaragaman hayati yang terpelihara dengan baik juga berkontribusi pada ketahanan iklim. Hutan yang sehat mampu menghadapi perubahan iklim dan bencana alam dengan lebih baik. Penelitian dari Prayogo et al. (2021) mengungkapkan bahwa keberagaman spesies yang tinggi dalam ekosistem hutan dapat memperkuat resistensi terhadap perubahan lingkungan.

Kesadaran global akan pentingnya pengelolaan hutan lestari semakin meningkat. Komitmen internasional, seperti Perjanjian Paris, menekankan perlunya aksi untuk mengurangi emisi dan melindungi hutan. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar, diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam inisiatif ini. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak pengelolaan hutan berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati dan iklim secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara praktik pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap ekosistem serta iklim. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk pengelolaan hutan di Indonesia

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, di mana untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan terkait pengelolaan hutan berkelanjutan dan dampaknya terhadap perubahan iklim serta keanekaragaman hayati. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari artikel ilmiah, laporan kebijakan, buku, dan dokumen dari organisasi internasional seperti Sulistiana (2017) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Literatur yang diambil dan dipilih berdasarkan relevansi topik, keterbaruan (minimal lima tahun terakhir), serta kualitas akademik dari sumber yang digunakan.

Data dikumpulkan dengan mencari dan menyeleksi literatur dari basis data akademik seperti Google Scholar. Proses seleksi dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang diikutsertakan adalah yang berfokus pada isu-isu pengelolaan hutan berkelanjutan, dampak terhadap emisi karbon, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, seperti tantangan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, peran berbagai pemangku kepentingan, dan dampak

pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati. Selain itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan hasil penelitian dari berbagai studi sehingga dapat diidentifikasi praktik-praktik pengelolaan hutan yang efektif serta tantangan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jasa ekosistem hutan memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan berbagai manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial. Jasa ekosistem adalah layanan yang disediakan oleh alam yang mendukung kehidupan manusia dan berbagai aktivitas ekonomi. Jasa ini mencakup penyimpanan karbon, penyediaan air bersih, pengaturan iklim, pemeliharaan keanekaragaman hayati, serta pelindung dari bencana alam.

Jasa ekosistem hutan membantu mengatur siklus hidrologi dan menjaga kualitas air. Hutan tropis Indonesia, misalnya, berperan sebagai penyaring air alami, mencegah erosi tanah, dan memelihara aliran air di sungai. Pengelolaan hutan yang baik dapat menghindarkan masyarakat dari risiko banjir dan kekeringan yang merusak, serta menyediakan air bersih yang esensial bagi kehidupan dan pertanian, dimana keadaan hutan Indonesia saat ini memiliki dampak yang besar bagi perekonomian. Di satu sisi, hutan menyediakan sumber daya alam penting seperti kayu, hasil hutan non-kayu, dan jasa ekosistem yang berkontribusi terhadap sektor kehutanan dan pertanian. Namun lagi-lagi, deforestasi yang tinggi menimbulkan tantangan serius, mengancam keberlanjutan ekonomi jangka panjang, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga kontribusi hutan terhadap ekonomi nasional dan mitigasi dampak lingkungan di masa depan.

Melalui diagram batang yang bersumber dari BPS mengenai deforestasi Indonesia (2013-2022) menunjukkan tren deforestasi netto yang signifikan, dengan kehilangan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan. Angka deforestasi terus berfluktuasi setiap tahunnya, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konversi lahan untuk pertanian, pembalakan liar, dan kebakaran hutan. Meskipun ada upaya konservasi, tantangan tetap besar. Deforestasi mengancam keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem hutan, yang berdampak langsung pada perekonomian melalui penurunan produktivitas lahan dan risiko lingkungan.

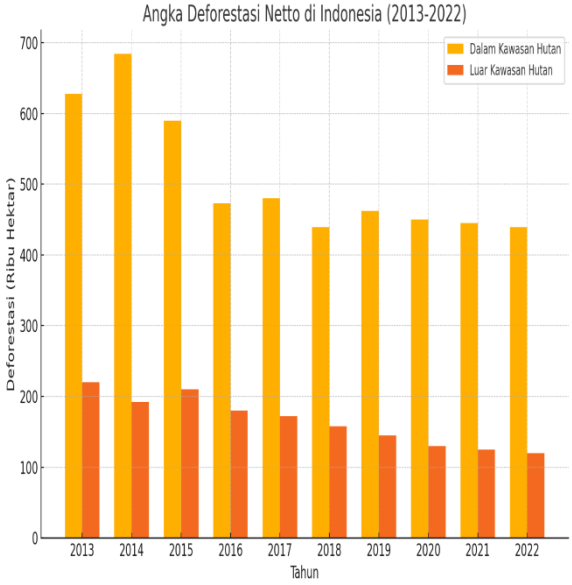

Dari gambar 1, dapat diketahui bahwa dalam kawasan hutan di Indonesia, deforestasi netto berkisar antara 439 ribu hektar hingga 684 ribu hektar per tahun. Pada tahun 2014, angka deforestasi tertinggi tercatat sebesar 684 ribu hektar, sementara tahun 2022 menunjukkan angka terendah sebesar 439 ribu hektar. Secara umum, terdapat penurunan deforestasi sejak 2014 hingga 2022, yang menunjukkan adanya upaya konservasi hutan dan pengurangan kegiatan yang merusak hutan di wilayah tersebut. Dan juga, Deforestasi di luar

Copyright © 2024 Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)
P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462)

kawasan hutan menunjukkan penurunan, dari 220 ribu hektar pada tahun 2013 menjadi 120 ribu hektar pada tahun 2022.

Pembahasan

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan kunci dalam mengatasi perubahan iklim, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki kawasan hutan tropis luas. Pengelolaan hutan ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem sembari memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana agar bisa dinikmati generasi saat ini dan mendatang.

Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink), membantu mengurangi gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Di Indonesia, program seperti FOLU Net Sink 2030 bertujuan mencapai keseimbangan emisi karbon dari sektor kehutanan pada 2030. Dengan menjaga keberlanjutan hutan dan memperbaiki area yang terdegradasi, Indonesia berupaya berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.

Namun, pengelolaan hutan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Ini melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembalakan liar, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan kebakaran hutan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, strategi seperti agroforestri, yang memadukan penanaman pohon dengan aktivitas pertanian, menjadi solusi yang efektif untuk mempertahankan keanekaragaman hayati sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selain itu, dalam rangka pengelolaan yang lebih baik, pemerintah Indonesia telah mengembangkan skema pendanaan mitigasi seperti pembayaran jasa lingkungan (PES) untuk mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pelestarian hutan. Skema ini memberikan insentif kepada pihak-pihak yang menjaga hutan, sehingga secara ekonomi menguntungkan.

Di beberapa wilayah, pengelolaan berbasis masyarakat juga terbukti berhasil. Contohnya, komunitas Toro di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi, telah menunjukkan peran aktif dalam menjaga hutan mereka dengan menerapkan teknik pengelolaan tradisional yang berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim. Hutan yang dikelola secara berkelanjutan juga mampu berperan dalam adaptasi perubahan iklim. Misalnya, lahan gambut yang dikelola dengan baik dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar dan mencegah kebakaran hutan, yang merupakan salah satu sumber utama emisi karbon di Indonesia.

Secara keseluruhan, pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi nasional Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat lokal dan sektor swasta, terutama dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem hutan di tengah tekanan pembangunan.

Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Tingkat Global dan Nasional

Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam mitigasi perubahan iklim baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat global, kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan didorong oleh inisiatif seperti Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). Program ini membantu negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi melalui skema insentif berbasis hasil (Result Based Payment). REDD+ memberikan dukungan finansial dari komunitas internasional, seperti Dana Hijau Global (GCF), yang telah

mengalokasikan dana lebih dari 103,8 juta USD untuk Indonesia.

Di tingkat Nasional, Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Salah satu inisiatif kunci adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang berfungsi sebagai unit manajemen kehutanan di tingkat lokal. KPH bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. KPH memadukan peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian hutan dan berperan dalam menurunkan emisi sektor kehutanan.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan. Perdagangan karbon ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk mengurangi emisi secara ekonomis, baik di pasar domestik maupun internasional.

Di tingkat global, pengelolaan hutan berkelanjutan terkait erat dengan komitmen untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim yang tertuang dalam Perjanjian Paris. Indonesia berperan aktif dalam memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan rencana seperti FOLU Net Sink 2030, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan emisi di sektor kehutanan pada 2030. Kebijakan ini mencakup upaya rehabilitasi lahan kritis, perlindungan hutan lindung, dan pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan hutan secara berkelanjutan.

Namun, keberhasilan kebijakan di tingkat nasional sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konversi hutan menjadi lahan pertanian. Oleh karena itu, pendekatan berbasis tapak melalui KPH dan skema pembayaran jasa lingkungan menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan.

Secara Internasional, Indonesia juga telah bekerja sama dengan berbagai negara dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan, seperti melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Pada akhirnya, kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan yang efektif tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pembangunan ekonomi. Peran hutan sebagai penyerap karbon dan pelindung ekosistem menjadi kunci dalam melawan perubahan iklim global.

Contoh Penerapan Hutan Berkelanjutan: Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan Di Indramayu

Di kabupaten Indramayu kegiatan pelestarian lingkungan hutan mangrove berupa kegiatan penanaman baru dan rehabilitasi sudah cukup banyak di lakukan tercatat sejak tahun 1995 hingga 2009 paling tidak ada sekitar 24 lokasi /desa yang telah mendapat program rehabilitasi hutan mangrove yang di laksanakan oleh BRLKT, LH kabupaten Indramayu, wetland, OISCA, himateka IPB, Subdin LH, dan dinas perkebunan, dan kehutanan (BP DAS) dan himapikan UNPAD.

Tantangan Dalam Implementasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Terdapat kecenderungan untuk lebih mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dibandingkan menciptakan terobosan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam

Kecenderungan peningkatan penggunaan energi emisi dan karbon sehingga hal tersebut mengindikasikan adanya ancaman terhadap keberlanjutan

Copyright © 2024 Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)
P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462)

pembangunan, terlebih jika tidak tersedia lagi cadangan energi atau energi alternatif.

Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi serta batubara.

Struktur ekonomi yang belum berbasis sumber daya alam,padahal pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan,dapat menciptakan sumber pertumbuhan baru melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pemahaman dan kebijakan tentang definisi dan konsep dasar sustainability (keberlanjutan) di Indonesia. Persoalan sangat mendasar yang belum pernah dibahas secara tuntas dalam konteks Indonesia.

Proses sertifikasi sustainable yang dinilai sebagian pihak tidak independen, transparan, akuntabel, dan kredibel.

Terdapat program konsep pemanfaatan hutan keberlanjutan yang di buat oleh pemerintah salah satunya sertifikasi ISPO diklaim sebagian pihak lebih mencerminkan kepentingan nasional. Prinsip, kriteria, dan indikator yang dibuat belum mampu menjawab permasalahan dan kelemahan tata kelola perizinan, pengawasan, inkonsistensi kebijakan, minimnya transparansi, lemahnya penegakan hukum yang terus terjadi dan kurang maksimalnya pemenuhan akses legalitas dan masalah pembiayaan.

Deforestasi serta degradasi hutan yang masih tinggi sebagai akibat dari tekanan yang meningkat dari pertumbuhan penduduk, perluasan lahan pertanian, serta penggunaan yang eksesif dan tidak efisien dari sumber daya hutan.

Kurang nya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan hanya mementingkan pihak yang memiliki modal besar, Kondisi ini seakan mengabaikan teori ekologi yang disampaikan oleh ahli lingkungan selama ini, bahwa interaksi yang baik antar komponen dalam ekosistem menjadi hal yang penting dan adanya perhutanan sosial berpotensi untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan

Dalam praktiknya perhutanan sosial belum dipandang sebagai kerja bersama dan kolaboratif. Ego sektoral dan ego wilayah masih mewarnai perjalanan perhutanan sosial sampai saat ini, walaupun berbagai bentuk kebijakan sudah dilakukan. Pemerintah masih perlu bekerja keras dalam mewujudkan kebijakan yang dapat menampung tujuan sektoral masing-masing entitas pembangunan, sambil juga menyusun kebijakan yang dapat mengikat semua stakeholders terkait.

Pada banyak kasus, tidak banyak pemerintah daerah yang memasukkan perhutanan sosial sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerahnya, tidak seperti program untuk pendidikan dan kesehatan.

KESIMPULAN

Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai Aset Ekonomi: Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Keanekaragaman hayati ini sangat berharga sebagai sumber daya yang mendukung ketahanan pangan, kesehatan, dan energi. Namun, pemanfaatan yang berlebihan dan degradasi lingkungan mengancam keberlanjutannya. Konservasi yang bijaksana diperlukan untuk menjaga keanekaragaman hayati sebagai aset ekonomi bagi generasi sekarang dan masa depan.

Deforestasi sebagai Ancaman Utama: Deforestasi akibat konversi lahan, pembalakan liar, dan aktivitas manusia lainnya terus berlanjut, mengakibatkan hilangnya hutan tropis yang menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Kehilangan hutan ini mengakibatkan kerusakan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap ekonomi dan lingkungan.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai Solusi: Pengelolaan hutan

berkelanjutan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi lingkungan. Praktik-praktik seperti penghijauan dan agroforestri dapat menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan stok karbon, serta mendukung pembangunan ekonomi yang lebih hijau. Pengelolaan yang baik juga akan membantu meminimalkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Global: Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah kebijakan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, termasuk inisiatif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan perdagangan karbon. Di tingkat global, Indonesia berperan aktif dalam berbagai inisiatif internasional seperti REDD+ dan FOLU Net Sink 2030 yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keberlanjutan hutan. Namun, tantangan implementasi di lapangan, termasuk pembalakan liar dan kebakaran hutan, masih menjadi kendala.

Pengelolaan Hutan Mangrove: Di wilayah pesisir, pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di Indramayu menjadi contoh sukses dalam pelestarian lingkungan. Melalui program rehabilitasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penanaman baru dan restorasi hutan mangrove telah berhasil mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BPS Indonesia. (15 Januari 2024). Angka Deforestasi Netto Indonesia di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2022. Retrieved From https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjA4MSMx/angka-deforestasi--netto--indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2022--ha-th-.html

Fitriani, A., Susanto, H., & Nurhidayah, A. (2021). Kebijakan lingkungan dalam menanggapi permasalahan perubahan iklim. *Ministrate: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 5*(2), 77-89..

Golar, G., Muis, H., Rosyid, A., & Simorangkir, W. S. (2023). Efforts the climate change mitigation and adaptation: the contributions of Toro communities in Lore Lindu National Park. *Jurnal Belantara, 6*(1), 115–125.

Hardiyanti, M., & Aminah, A. (2019). Tinjauan yuridis terhadap prinsip pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa. *Bina Hukum Lingkungan, 4*(1), 135–152.

Husain, F., & Korbaffo, Y. F. P. (2024). Upaya pemerintah Indonesia dalam pelestarian lahan basah melalui program FOLU Net Sink 2030. *Environmental Pollution Journal, 4*(1), 949–957.

Ishlaha, R. S., & Subekti, R. (2023). Kajian penataan pengelolaan hutan: Sebuah terobosan dalam menata kembali konsep hutan berbasis sustainable forest management. *Jurnal Pacta Sunt Servanda, 4*(1), 190–203.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023). Kesatuan Pengelolaan Hutan, kunci strategis kurangi emisi sektor kehutanan. *Menlhk.go.id. Retrieved from https://www.menlhk.go.id.*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan Tahunan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia*.

Purnomo, E. P., Ramdani, R., Salsabila, L., & Choi, J. W. (2020). Challenges of community-based forest management with local institutional differences between South Korea and Indonesia. *Development in Practice, 30*(8), 1082-1093.

Copyright © 2024 Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)
P-ISSN (2829-8888) & E-ISSN (2829-8462)

Sulistiana, S. (2017). Potensi Mangrove sebagai Karbon Biru Indonesia bagi Pembangunan Berkelanjutan. *Peran Matematika, Sains, Dan Teknologi Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs*, 281-303.

Supriyadi, S., Vera, I. L. P., & Purwanto, P. (2021). Soil quality at rice fields with organic, semi-organic and inorganic management in Wonogiri Regency, Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, *36*(2), 259-269.

Yusniar Juliana Nababan, Y. S. (2014). Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur:Menuju Inclusive Green Economy. Masyarakat Indonesia, 211-228.*Dan Ekonomi*, *1*(2), Page 218–223. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i2.36

Harefa, I., & Hulu, T. H. S. (2022). Analisis Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), Page 146–151. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.25

Larosa, Y. M., Waruwu, M. H., & Laia, O. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Etos Kerja Pegawai. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(1), 124–130. https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.22

Siregar, F. A., & Usriyah, L. (2021). Peranan komunikasi organisasi dalam manajemen konflik. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, *5*(2), 163-174.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Triantini, Z. E. (2019). Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, *2*(2), 1-18.

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Peran Kepemimpinan dalam Manajemen Organisasi: Studi Kasus Konflik Internal Partai Demokrat dalam Perebutan Kepemimpinan. *Tanah Pilih*, *1*(2), 91-107.

Zafarina, S. A., & Frianto, A. (2021). Pengaruh Konflik Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *9*(3), 1184-1195.

Zainal, V. R., Hadad, M. D., & Ramly, M. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.